

# Analisis LQ, DLQ, dan SS Dalam Penentuan Sektor Basis dan Non-Basis Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Afriyadi \*<sup>1</sup>  
Abdiel Oktavianus Laia <sup>2</sup>  
Khairani, Lukfi Indiarti Umi Rahayu <sup>3</sup>  
Tiara Suci Istiqomah <sup>4</sup>  
Wendi <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang  
\*e-mail : [24622065.wendi@mhs.stie-pembangunan.ac.id](mailto:24622065.wendi@mhs.stie-pembangunan.ac.id)

## Abstrak

Meski kaya akan sumber daya alam (mineral, energi, bahan galian strategis/vital/umum), Provinsi Kepulauan Riau menyadari keterbatasan SDA tak terbarukan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu berfokus pada sektor unggulan (basis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Shift Share. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa terdapat 4 sektor basis saat ini. Namun, analisis tren menunjukkan dua di antaranya yakni Pertambangan & Pengecambahan serta Pengelolaan Sampah/Limbah berpotensi kehilangan status basis di masa yang akan datang. Sebaliknya, Industri Pengolahan dan Konstruksi diproyeksikan menjadi sektor basis baru yang prospektif. Untuk mengantisipasi risiko, pemerintah perlu mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial. Dengan analisis shift share, terlihat bahwa pemerintah dapat mengembangkan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan berdaya saing baik seperti Pengadaan Listrik/Gas, Perdagangan, Transportasi/Pergudangan, Akomodasi/ Makan Minum, Informasi/Komunikasi, serta Jasa Perusahaan dan Lainnya.

**Kata Kunci:** Analisis Sektoral, Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share (SS), Diversifikasi Ekonomi.

## Abstract

Despite its abundant natural resources (minerals, energy, strategic/vital/general mining commodities), the Riau Islands Province recognizes the limitations of its non-renewable resources. Therefore, economic development needs to focus on leading (base) sectors. This research employs the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share methods. The findings identify 4 current base sectors. However, trend analysis indicates that two of them – Mining & Quarrying and Waste Management – are likely to lose their base status in the future. Conversely, the Processing Industry and Construction are projected to become new, prospective base sectors. To anticipate risks, the government needs to diversify the economy by developing potential sectors. Through shift share analysis, it is evident that the government can develop sectors with rapid growth and high competitiveness, such as Electricity/Gas Supply, Wholesale/Retail Trade & Vehicle Repair, Transportation/Warehousing, Accommodation/Food & Beverage Services, Information/Communication, as well as Corporate Services and Other Services.

**Keyword:** Sectoral Analysis, Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share (SS), Economic Diversification

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta (Subandi, 2014). Memahami indikator-indikator perekonomian di era globalisasi menjadi hal penting pada pemahaman terkait dinamika pada pembangunan suatu negara (Ikhlasari & Salim, 2024). Dalam konteks ekonomi daerah—menurut Prof Jimly Asshiddiqie, S.H., otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban sebuah daerah otonom dalam rangka mengatur, mengurus, dan mengelola pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2007). (Sofiyani, 2014) berpendapat bahwa adanya otonomi daerah merupakan langkah awal suatu daerah agar dapat mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki sehingga tercipta pertumbuhan di daerah

tersebut. Globalisasi menuntut daerah agar meningkatkan kompetisi ekonomi sesuai prinsip otonomi daerah, dengan indikator ekonomi di tingkat provinsi sebagai tolok ukur keberhasilan desentralisasi serta kemampuan bersaing secara global. Maka dari itu, agar suatu wilayah mampu meningkatkan kompetisi ekonomi, pemerintah harus dapat menentukan sektor-sektor pekerjaan apa saja yang menjadi sektor penggerak ekonomi suatu wilayah.

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi yang terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna dan merupakan wilayah hasil pemekaran dari provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan secara resmi menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai sebuah provinsi dengan luas wilayah sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>. Hanya 4% dari luas wilayah Kepulauan Riau ini yang merupakan daratan, 96% sisanya merupakan lautan. Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten (Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna), 2 Kota (Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang), 52 Kecamatan, dan 299 Kelurahan/Desa.

Provinsi Kepri memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar, mulai dari mineral dan energi, hingga sumber daya alam yang bervariasi berupa bahan galian strategis seperti migas, bahan galian vital seperti timah, bauksit, dan pasir besi, serta bahan galian umum seperti granit, pasir, dan juga kuarsa. Sumber daya alam yang melimpah mendorong perkembangan perekonomian suatu daerah. Namun, sumber daya alam tersebut bersifat tak terbarukan atau terbatas. Sebagai akibatnya, pembangunan ekonomi harus difokuskan pada pembangunan sektor basis/sektor unggulan.

**Tabel 1** - *Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Riau atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2020 - 2024 (miliar rupiah)*

<b>Klasifikasi Lapangan Usaha</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>	<b>2024**</b>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.466,78	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17
B. Pertambangan dan Penggalian	24.933,55	24.748,82	23.015,61	22.406,26	20.650,99
C. Industri Pengolahan	71.325,79	75.925,35	79.348,16	81.302,96	87.616,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.580,66	1.648,93	1.919,01	2.073,12	2.222,43
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	218,65	218,68	237,96	248,56	253,49
F. Konstruksi	31.752,17	33.256,03	34.917,26	38.580,25	40.799,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.449,61	13.592,98	15.477,62	16.385,52	17.301,86
H. Transportasi dan Pergudangan	2.558,45	2.514,94	3.479,88	3.999,01	4.099,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.526,91	2.357,95	3.530,11	4.494,33	4.683,68
J. Informasi dan Komunikasi	5.392,39	5.909,45	6.421,12	7.702,88	7.698,40
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.798,29	4.833,25	5.035,02	5.470,38	5.875,90
L. Real Estat	2.330,97	2.247,92	2.352,27	2.475,66	2.614,14

M,N. Jasa Perusahaan	5,03	5,74	6,61	7,82	8,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.398,45	4.028,29	4.163,45	4.376,99	5.158,77
P. Jasa Pendidikan	2.259,58	2.183,17	2.255,62	2.342,98	2.435,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.679,46	1.886,04	1.885,75	1.794,92	2.146,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	282,47	272,86	463,78	563,56	653,43
<b>Total PDRB</b>	<b>174.959,21</b>	<b>180.952,45</b>	<b>190.111,09</b>	<b>199.912,83</b>	<b>209.939,06</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau*

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (2024), berbagai lapangan usaha ekonomi sangat berkontribusi dalam pembentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha (Hakim, Qomariyah, & Susanti, 2020). Dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) sektor industri pengolahan menjadi sektor ekonomi paling besar kontribusinya dalam 5 tahun terakhir yang mencatatkan porsi sebesar Rp. 87.616,69 Milyar Rupiah. Sementara itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan menjadi 2 sektor ekonomi paling rendah dalam PDRB Kepri tahun 2024 dengan hanya mencatatkan porsi sebesar Rp. 253,49 Milyar Rupiah dan Rp. 8,21 Milyar Rupiah.

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) inilah yang menjadi kompas strategis dalam pembangunan, karena memberikan gambaran mengenai kinerja perekonomian daerah tersebut. Tidak hanya memberikan gambaran mengenai kinerja perekonomian suatu daerah, namun PDRB dan PDB juga mampu mengungkapkan sektor-sektor kunci yang perlu dioptimalkan untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah (Nasution & Rujiman, 2023). Guna memaksimalkan pertumbuhan daerah Kepulauan Riau yang optimal, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau sebagai pelaksana otonomi perlu mengidentifikasi dan memfokuskan kebijakan pada sektor-sektor kunci yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kepri.

Penerapan otonomi bukan hanya menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau, namun juga menjadi tuntutan agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif dalam mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengenali sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau. Sudah seharusnya sektor-sektor berkontribusi besar terhadap PDRB menjadi fokus intervensi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat meningkatkan tingkat produktivitasnya.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menentukan sektor unggulan (basis), serta menggambarkan pergeseran dan penyebab pergeseran sektor perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat masukan bagi pengambil keputusan di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai informasi bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengenai sektor yang menguntungkan dan berpotensi dimasa mendatang. Dengan menarik investasi, hal ini akan menimbulkan *multiplier effect* bagi daerah seperti penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru, berarti adanya penciptaan pendapatan masyarakat

yang akan mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Gravitiani, 2006).

## TINJAUAN TEORI

### Teori Pembangunan Ekonomi

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita sebuah negara untuk masa jangka panjang yang ditandai dengan perubahan dalam masyarakat yakni perubahan dalam teknologi maupun pola pikir masyarakat.

Sedangkan menurut Subandi dalam (Mulyana S. M., 2023) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup atau pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita, sambil mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan mengakibatkan perubahan struktural ekonomi serta pemerataan pendapatan dalam suatu negara.

Dapat terlihat dari pendapat kedua ahli diatas, bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya merupakan menaikkan angka pendapatan per kapita, melainkan mampu membuat perubahan dalam struktural ekonomi. Maksud dari perubahan dalam struktural ekonomi adalah mengurangi jumlah penduduk yang tergolong miskin. Pengurangan jumlah penduduk yang miskin dapat kita jadikan sebagai tolak ukur berhasilnya pembangunan ekonomi suatu daerah. Saat pemerintah berhasil mengurangi penduduk miskin, hal ini akan menimbulkan *multiplier effect* mulai dari peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, tersedianya akses yang lebih baik terhadap layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan sehingga menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah telah berjalan dengan efektif.

### Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2016), pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam masyarakat yang menyebabkan kesejahteraan meningkat. Sedangkan menurut (Arsyad, 1999), pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* dengan mengesampingkan apakah pertumbuhan kedua komponen tersebut lebih besar ataupun lebih kecil dari pertumbuhan penduduk serta mengesampingkan perubahan dalam struktur ekonomi.

Dari kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan *Gross Domestic Product (GDP)* dan *Gross National Product (GNP)* menuju arah peningkatan yang diketahui dengan cara membandingkannya dari tahun ke tahun. Dalam kebijakan pemerintahan terutama RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi fokus utama. Namun, aspek-aspek seperti aspek lingkungan dan sosial harus tetap menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan juga secara berkelanjutan. Kenaikan pendapatan perkapita di masyarakat dapat menjadi tolak ukur kenaikan pertumbuhan ekonomi, meskipun belum menjadikan hal tersebut sebagai indikator tunggal (Khoirudin & Musta'in, 2020).

### Teori Basis/ Teori Sektor Unggulan

Menurut (Hutapea, Koleangan, & Rorong, 2020) yang mengutip pernyataan Saharuddin (2005) menyatakan bahwa teori basis ekonomi membagi kegiatan ekonomi menjadi dua sektor: yakni sektor basis ekonomi dan sektor non-basis ekonomi. Sektor basis memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah karena berorientasi apda ekspor barang dan jasa ke luar wilayah setelah kebutuhan internal daerah telah terpenuhi. Berbanding terbalik dengan sektor basis, sektor non-basis merupakan sektor pendukung yang fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah karena kapasitasnya yang hanya terbatas pada cakupan lokal sehingga tidak melakukan ekspor ke luar wilayah.

Menurut (Asmara & Yekti, 2024) sektor unggulan merupakan sektor yang mampu memenuhi kebutuhan lokal yang dimana sektor tersebut memiliki daya saing tersendiri

(unggul) dibanding sektor sejenisnya yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah.

Dari kedua pendapat, dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan/sektor basis merupakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang terlihat dari berbagai macam aspek mulai dari ketersediaan dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, teknologi yang modern dan canggih, serta sumber daya alam yang melimpah dan mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah/regional dalam periode waktu tertentu yang menghitung jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2021). PDRB sendiri dapat dihitung melalui dua cara, yakni PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB harga konstan merupakan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara tahunan dengan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran ataupun perubahan, dan juga struktur ekonomi pada suatu wilayah.

Menurut (Gatari, Asmara, & Khasanah, 2024), untuk menghitung kemajuan ekonomi pada sebuah daerah, dapat menggunakan PDRB. PDRB mencerminkan jumlah dari nilai tambah semua bisnis yang beroperasi di wilayah tertentu yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lokal. Jumlah PDRB yang dihasilkan oleh tiap-tiap wilayah, sangat bergantung pada potensi SDA dan faktor produksi yang tersedia pada wilayah tersebut.

### **Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator dalam sistem neraca nasional yang menggambarkan nilai pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah pada periode tertentu untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara, mengetahui struktur perekonomian, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah (BPS, 2024). PDB akan menunjukkan sejauh mana arah perkembangan ekonomi suatu negara. Sektor-sektor yang berkembang dan tumbuh pesat akan berdampak positif pada pertumbuhan. Sebuah negara sangat perlu merancang kebijakannya dalam memetakan Produk Domestik Bruto (PDB) nya agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Ibarat kompas, PDB dapat digunakan sebagai sumber pandangan tentang kondisi ekonomi suatu negara serta sebagai tolak ukur dalam perumusan strategi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan PDRB sektoral Provinsi Kepulauan Riau yang didasarkan pada harga konstan menurut sektor usaha menjadi populasi penelitian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan menurut lapangan usaha Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020-2024 dan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada harga konstan menurut sektor usaha pada tahun 2020-2024 menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *time series* 2020-2024 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau. Fokus atau subjek dari penelitian dikenal dengan sebutan variabel penelitian. Variabel dari penelitian ini yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau yang diukur dalam miliaran rupiah, Produk Domestik Bruto (PDB) dalam miliaran rupiah, dan Sektor Unggulan (Sektor Basis).

### **Metode Analisis Data**

#### **Analisis Location Quotient (LQ)**

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Pendekatan yang bisa digunakan untuk menilai keunggulan relatif dari sektor

ekonomi tertentu pada suatu wilayah yakni analisis Location Quotient (LQ). Menurut (Widodo, 2006) teknik LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan/ industri dalam suatu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Dalam metode LQ, kegiatan ekonomi daerah terbagi menjadi dua bagian yakni sektor basis dan non-basis. Sektor basis merupakan sektor yang spesialisasinya lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain karena mampu memenuhi permintaan pasar di daerah sendiri maupun memenuhi permintaan pasar di luar daerah. Kedua merupakan sektor non-basis atau sektor lokal. Sektor ini tidak unggul dan spesialisasinya cenderung lebih rendah karena hanya mampu melayani pasar di wilayah atau daerah sendiri. Analisis LQ memiliki 3 kriteria penilaian, yakni:

1. Ketika  $LQ > 1$ , sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor unggul (basis) yang berarti tingkat yang spesialisasinya lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain karena mampu melayani pasar di daerah sendiri maupun melayani pasar di luar daerah.
2. Ketika  $LQ < 1$ , sektor ini diklasifikasikan sebagai yang tidak unggul (non-basis) dan spesialisasinya cenderung lebih rendah karena hanya mampu melayani pasar di wilayah atau daerah sendiri.
3. Ketika  $LQ = 1$ , sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor yang tidak unggul (non-basis), namun sektor ini sama baiknya di daerah maupun secara nasional.

Analisis Location Quotient (LQ) memiliki formula yakni:

$$\text{Location Quotient (LQ)} = \frac{Si/PDRBi}{Ni/PDBi}$$

Keterangan:

Si	: PDRB sektor i pada Provinsi Kepulauan Riau
PDRB	: Keseluruhan PDRB pada Provinsi Kepulauan Riau
Ni	: PDB sektor i pada tingkat Nasional
PDB	: Keseluruhan PDB di Indonesia

Metode Location Quotient (LQ) tentunya memiliki kelemahan, yakni hanya memberikan gambaran pada satu waktu tertentu dan tidak bisa memberikan gambaran di masa depan. Sebagai contoh, sebuah sektor yang menjadi sektor basis di tahun 2020 belum pasti akan menjadi sektor basis juga di tahun 2021 atau masa yang akan datang, begitu juga sebaliknya sektor yang memiliki status non-basis di tahun 2020 belum pasti tetap menjadi sektor non-basis di tahun 2021 atau masa yang akan datang.

**Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)**

Dalam mengatasi kelemahan analisis Location Quotient (LQ), digunakanlah perkembangan dari analisis Location Quotient yakni analisis Dynamic Location Quotient (DLQ). Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) memperlihatkan reposisi atau perubahan sektoral dari analisis Location Quotient (LQ). Menurut (Sambodo, 2002) prinsip Dynamic Location Quotient (DLQ) sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya saja analisis DLQ mengintroduksi laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri dari waktu tahun awal hingga tahun berjarak. Menurut (Tarigan, 2005) Dynamic Location Quotient merupakan modifikasi dari LQ yang mengakomodasi besarnya PDRB dari satu waktu ke waktu lainnya dan bisa menunjukkan perkembangan LQ pada suatu sektor tertentu pada waktu yang berbeda, apakah mengalami penurunan atau kenaikan.

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) memiliki formula yakni:

$$\text{Dynamic Location Quotient} = \left[ \frac{1 + gik}{1 + gk} \right] \left[ \frac{1 + Gtp}{1 + Gp} \right] t$$

DLQ	: Nilai Dynamic Location Quotient (DLQ)
gik	: Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Kepulauan Riau
gk	: Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau

Gtp : Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Indonesia  
Gp : Rata-rata laju pertumbuhan PDB di Indonesia  
t : Jumlah tahun di analisis

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) memiliki 2 kriteria penilaian, yakni:

1. Ketika nilai DLQ > 1, maka sektor tersebut diharapkan untuk menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang (prospektif).
2. Ketika nilai DLQ < 1, maka sektor tersebut kurang bisa diharapkan untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang (non-prospektif).

### Analisis Shift Share (SS)

Analisis Shift Share merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui perubahan berbagai indikator ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu antara daerah dan wilayah acuan. Metode ini dianggap lebih tajam dibanding dengan analisis Location Quotient (LQ) karena menerangkan penyebab perubahan atas variabel-variabel. Menurut (Hakim, Qomariyah, & Susanti, 2020), metode pengisolasian adalah metode yang digunakan dalam analisis ini sebagai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu waktu ke waktu lainnya. Terdapat 3 komponen utama dalam analisis ini, yakni:

#### 1. Perubahan Nasional (PN)

Perubahan Nasional (PN) merupakan perubahan produksi/kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi/kesempatan kerja secara umum. Maksudnya, PN menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian provinsi.

#### 2. Pertumbuhan Proporsional (PP)

Pertumbuhan Proporsional (PP) merupakan pertumbuhan setiap sektor karena adanya perbedaan setiap sektor dalam permintaan produk akhir, ketersediaan bahan mentah, kebijakan industri (seperti pajak, subsidi, dan *price support*), serta struktur pasar. Analisis ini membantu menunjukkan perubahan secara relative kinerja suatu sektor di Provinsi terhadap sektor yang sama di tingkat Nasional. Perhitungan PP menunjukkan apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dari pada perekonomian yang dijadikan acuan.

#### 3. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) merupakan komponen yang memberikan informasi dalam menentukan pertumbuhan atau besarnya daya saing sektor secara regional dengan nasional. Daya saing ini ditentukan oleh beberapa faktor, mulai dari keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, dan kebijakan ekonomi regional.

#### 4. Pergeseran Bersih (*Net Shift*)

Pergeseran Bersih (PB) adalah perubahan pertumbuhan suatu sektor di suatu wilayah, yang dihitung setelah memperhitungkan Pertumbuhan Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah yang menunjukkan bagaimana sektor tertentu di suatu wilayah bergerak turun atau tumbuh dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nasional.

Pergeseran Bersih (*Net Shift*) memiliki 2 kriteria penilaian, yakni:

1. Apabila  $PB \geq 0$ , maka pertumbuhan sektor a di wilayah b termasuk progresif (maju)
2. Apabila  $PB < 0$ , maka pertumbuhan sektor a di wilayah b termasuk lambat

Analisis Shift Share (SS) memiliki formula yaitu:

1. Efek Pertumbuhan Ekonomi Regional (Perubahan Sektoral)

$$Dij: PN + PP + PPW$$

2. Pertumbuhan Nasional (PN)

$$PNij: (Ra) Yij$$

3. Pertumbuhan Proporsional (PP)

$$PPij: (Ri - Ra) Yij$$

4. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

$$PPWij: (ri - Ri) Yij$$

5. Pergeseran Bersih (PB)

$$PB_{ij} : PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Dimana  $r_i$ ,  $R_i$ , dan  $R_a$  mewakili laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dan laju pertumbuhan PDB Indonesia yang disebut rasio indikator kegiatan ekonomi yang masing-masing memiliki formula yakni:

$$r_i : \frac{Y'_{ij} - Y_{ij}}{Y_{ij}}$$

$$R_i : \frac{Y'_i - Y_i}{Y_i}$$

$$R_a : \frac{Y' - Y}{Y}$$

Keterangan:

$Y'_{ij}$  : Total PDRB sektor  $i$  Provinsi Kepulauan Riau pada tahun awal

$Y_{ij}$  : Total PDRB sektor  $i$  Provinsi Kepulauan Riau pada tahun akhir

$Y'_i$  : Total PDB sektor  $i$  Indonesia pada tahun awal

$Y_i$  : Total PDB sektor  $i$  Indonesia pada tahun akhir

$Y'$  : Total PDB Indonesia pada tahun awal

$Y$  : Total PDB Indonesia pada tahun akhir

$r_i$  : Laju pertumbuhan PDRB sektor  $i$  Provinsi Kepulauan Riau pada tahun dasar

$R_i$  : Laju pertumbuhan PDB sektor  $i$  di Indonesia pada tahun dasar

$R_a$  : Laju pertumbuhan PDB di Indonesia pada tahun dasar

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Tabel 2 – Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata LQ	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,243	0,233	0,240	0,241	0,240	0,239	Non-Basis
2	Pertambangan dan Penggalan	1,933	1,850	1,652	1,514	1,330	1,656	Basis
3	Industri Pengolahan	1,978	2,042	2,039	1,995	2,059	2,023	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,890	0,882	0,965	0,993	1,016	0,949	Non-Basis
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,418	1,355	1,431	1,424	1,430	1,412	Basis
6	Konstruksi	1,815	1,854	1,912	2,012	1,988	1,916	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,595	0,576	0,623	0,629	0,633	0,611	Non-Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,399	0,381	0,440	0,443	0,418	0,416	Non-Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,518	0,466	0,625	0,723	0,694	0,605	Non-Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,507	0,521	0,527	0,587	0,546	0,538	Non-Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,643	0,639	0,655	0,678	0,696	0,662	Non-Basis
12	Real Estat	0,441	0,414	0,427	0,443	0,456	0,436	Non-Basis
13	Jasa Perusahaan	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	Non-Basis

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,738	0,680	0,687	0,711	0,787	0,720	Non-Basis
15	Jasa Pendidikan	0,395	0,383	0,394	0,402	0,403	0,395	Non-Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,724	0,738	0,720	0,654	0,723	0,712	Non-Basis
17	Jasa Lainnya	0,088	0,084	0,130	0,143	0,151	0,119	Non-Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (Diolah)

Hasil analisis Location Quotient dari 17 sektor ekonomi berdasarkan harga konstan, sesuai dengan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki empat sektor yang merupakan sektor basis (unggulan), keempat sektor tersebut yaitu: sektor Pertambangan dan Penggalian (1,656); sektor Industri Pengolahan (2,023); sektor Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (1,412); dan sektor Konstruksi (1,916). Dengan nilai koefisien > 1 maka ke empat sektor tersebut menjadi sektor basis ekonomi di Provinsi di Kepulauan Riau dan memiliki keunggulan secara komparatif. Apabila sektor tersebut dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal, sektor ini bisa menjadi sektor yang berpotensi besar sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga dapat di ekspor ke luar Provinsi Kepulauan Riau.

Terdapat 13 sektor lainnya yang bukan merupakan sektor basis (unggulan), yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,239); Pengadaan Listrik dan Gas (0,949); Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,611); Transportasi dan Pergudangan (0,416); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,605); Informasi dan Komunikasi (0,538); Jasa Keuangan dan Asuransi (0,662); Real Estat (0,436); Jasa Perusahaan (0,002); Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,720); Jasa Pendidikan (0,395); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,712); Jasa Lainnya (0,119). Dengan nilai koefisien < 1, ke-13 sektor ini masih belum mampu untuk melakukan ekspor ke luar Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. Perkiraan Sektor-Sektor Basis di Masa yang akan Datang

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang akan menjadi sektor basis di masa yang akan datang, maka dari itu digunakanlah analisis Dynamic Location Quotient untuk menunjukkan perkembangan LQ pada suatu sektor tertentu pada waktu yang berbeda, apakah terdapat penurunan atau kenaikan dengan cara mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa tiap-tiap sektor ekonomi mempunyai kecepatan berkembang sendiri-sendiri tiap tahunnya yang dihitung berdasarkan perubahan dari tahun awal sampai tahun terakhir yang diamati.

Tabel 3 – Hasil Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Uraian	Analisis DLQ			DLQ	Keterangan
		$(1+g_{ik})/(1+g_k)$	$(1+G_{tp})/(1+G_p)$	t		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,283241828	0,5844821	5	0,026726	Non-Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,925576323	1,019399168	5	-0,61708	Non-Prospektif
3	Industri Pengolahan	1,565989716	0,881676993	5	17,67653	Prospektif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,944466675	1,112117451	5	16,33989	Prospektif
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,930380114	1,117170656	5	0,400594	Non-Prospektif

6	Konstruksi	1,307083449	0,8401685	5	9,113488	Prospektif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,993400415	0,957591258	5	1,201492	Prospektif
8	Transportasi dan Pergudangan	1,003854392	1,621336073	5	0,090989	Non-Prospektif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,050532419	1,323042348	5	8,942614	Prospektif
10	Informasi dan Komunikasi	3,17614271	2,057601539	5	8,763824	Prospektif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,216376337	0,965112074	5	3,180175	Prospektif
12	Real Estat	0,456811753	0,715278482	5	0,106245	Non-Prospektif
13	Jasa Perusahaan	0,836008087	1,166474712	5	0,189093	Non-Prospektif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,643668349	0,684662642	5	79,74212	Prospektif
15	Jasa Pendidikan	0,241996706	0,626400249	5	0,008606	Non-Prospektif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,597067634	1,931413569	5	0,386581	Non-Prospektif
17	Jasa Lainnya	2,13851719	1,48928007	5	6,104946	Prospektif

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (Diolah)*

Hasil analisis Dynamic Location Quotient Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan bahwa terdapat 9 sektor yang prospektif atau berkemungkinan dan diharapkan menjadi sektor basis di masa depan bagi Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor tersebut diantaranya: sektor Industri Pengolahan (17,67653); sektor Pengadaan Listrik dan Gas (16,33989); sektor Konstruksi (9,113488); sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1,201492); sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,942614); sektor Informasi dan Komunikasi (8,763824); sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (3,180175); sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (79,74212); dan sektor Jasa Lainnya (6,104946).

Sedangkan, terdapat 8 sektor yang non-prospektif atau kurang berkemungkinan menjadi sektor basis di masa depan bagi Provinsi Kepulauan Riau. Sektor-sektor tersebut diantaranya: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,026726); sektor Pertambangan dan Penggalan (-0,61708); sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (0,400594); sektor Transportasi dan Pergudangan (0,090989); sektor Real Estat (0,106245); sektor Jasa Perusahaan (0,189093); sektor Jasa Pendidikan (0,008606); dan sektor Jasa Kesehatan dan Jasa Kegiatan Sosial (0,386581). Ke-sembilan sektor yang memiliki nilai > 1 memiliki arti bahwa sektor ini merupakan sektor yang prospektif atau berkemungkinan dan diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Menariknya, terdapat dua sektor yang secara jelas menunjukkan bahwa analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh analisis Location Quotient (LQ) yakni sektor Pertambangan dan Penggalan serta sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Pada analisis LQ, secara rata-rata sektor Pertambangan dan

Penggalian (1,656) dan sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (1,412) memiliki koefisien > 1 yang menunjukkan bahwa mereka merupakan sektor basis. Namun Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut kedepannya tidak berkemungkinan menjadi sektor basis lagi karena cenderung mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

Kombinasi antara nilai analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) dapat dijadikan kriteria dalam menentukan sektor ekonomi tersebut termasuk unggulan (Basis - Prospektif), prospektif (Non-Basis - Prospektif), stagnan (Basis, Non-Prospektif), dan tertinggal (Non-Basis - Non-Prospektif).



**Gambar 1 – Interpretasi Kombinasi nilai Location (LQ) dan**

*antara analisis Quotient analisis*

*Dynamic Location Quotient (DLQ) dalam kurun waktu 2020-2024.*

3. Hasil Analisis Shift Share (SS)

**Tabel 4 – Hasil Perhitungan Analisis Shift Share (SS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.**

No	Uraian	PN	PP	PPW	PB	Dij
		Milyar	Milyar	Milyar	Milyar	Milyar
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.120,21	- 779,404	- 87,42	- 866,82	253,39
2	Pertambangan dan Penggalian	5.109,21	88,518	-9.480,29	-9.391,77	- 4.282,56
3	Industri Pengolahan	14.615,58	-1.417,12	3.092,44	1.675,32	16.290,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	323,9	50,369	267,50	317,87	641,77
5	Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	44,8	- 11,014	1,05	- 9,96	34,84
6	Konstruksi	6.506,43	- 866,916	3.407,81	2.540,90	9.047,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.756	122,929	973,32	1.096,25	3.852,25
8	Transportasi dan Pergudangan	524,26	839,003	177,67	1.016,67	1.540,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	517,8	464,637	1.174,34	1.638,97	2.156,77
10	Informasi dan Komunikasi	1.104,97	684,468	516,57	1.201,04	2.306,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	983,23	- 330,332	424,71	94,38	1.077,61
12	Real Estat	477,65	- 274,962	80,49	- 194,48	283,17
13	Jasa Perusahaan	1,03	0,405	1,74	2,15	3,18

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	901,3	- 445,28	304,30	- 140,98	760,32
15	Jasa Pendidikan	463,02	- 320,987	33,70	- 287,29	175,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	344,14	133,092	- 9,99	123,11	467,25
17	Jasa Lainnya	57,88	42,804	270,27	313,08	370,96
Total		35.851,42	-2.019,789	1.148,215	-871,574	34.979,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (Diolah)

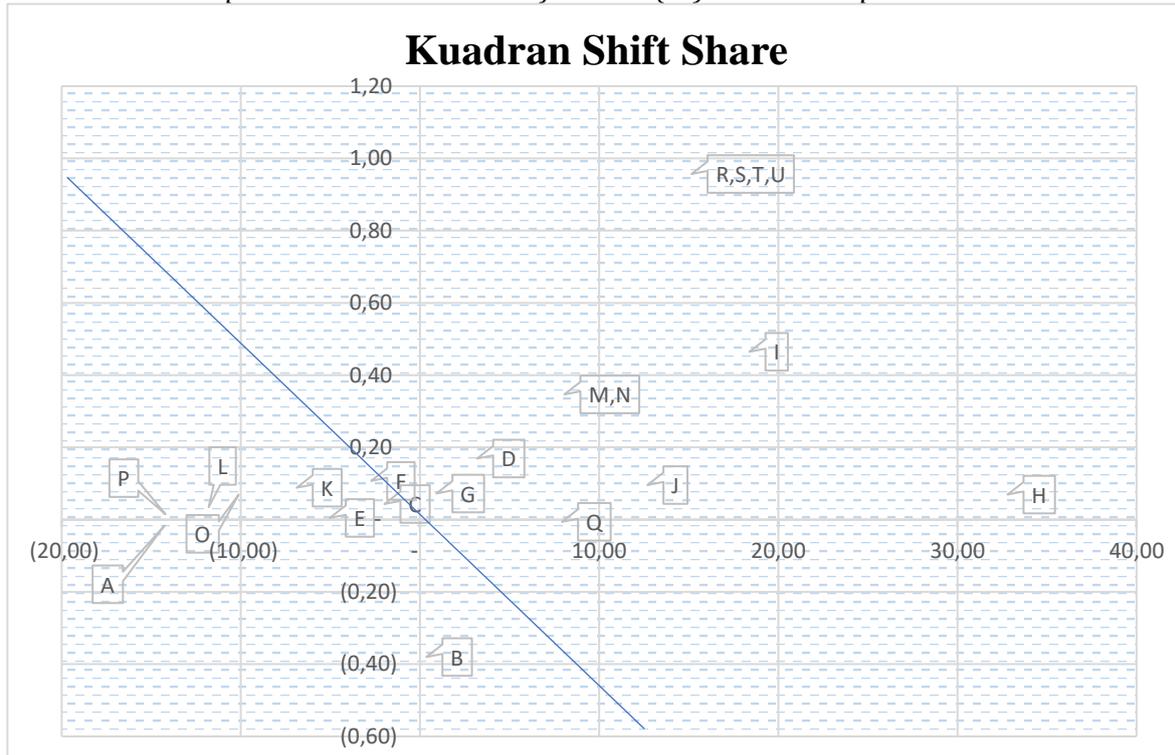
Hasil analisis *Shift Share (SS)* dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024, nilai PDRB sektoral Provinsi Kepulauan Riau telah bertumbuh sebesar Rp. 34.979,85 miliar rupiah yang dipengaruhi oleh komponen Pertumbuhan Nasional, Pertumbuhan Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah. Perhitungan komponen Pertumbuhan Nasional (PN) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 35.851,42 miliar rupiah. Semua sektor menunjukkan nilai positif yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Nasional (PN) mempengaruhi pertumbuhan semua sektor. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai Pertumbuhan Nasional (PN) sebesar Rp. 14.615,58 miliar rupiah.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) menunjukkan besarnya perubahan pertumbuhan setiap sektor dengan interpretasi apabila  $PP_{ij} < 0$ , maka pertumbuhan sektor  $i$  pada wilayah  $j$  tergolong lambat (mengalami perlambatan). Namun, apabila  $PP_{ij} > 0$  maka pertumbuhan sektor  $i$  pada wilayah  $j$  tergolong cepat. Berbeda dengan perhitungan komponen PN yang memberikan hasil positif, hasil analisis komponen Pertumbuhan Proporsional menunjukkan bahwa secara kumulatif, perubahan proporsional memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan mencatatkan angka sebesar -Rp 2.019,789 yang mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Proporsional Provinsi Kepulauan Riau secara kumulatif relatif lambat (mengalami perlambatan). Terdapat hal menarik yang ditemukan, yakni meskipun sektor Industri Pengolahan mencatatkan diri sebagai penyumbang nilai pertumbuhan tertinggi sebesar Rp. 14.615,58 namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perlambatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau yang mencatatkan perlambatan sebesar -Rp. 1.417,12. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara cepat adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan sektor Jasa Lainnya.

Komponen ketiga, merupakan komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Komponen PPW secara kumulatif mencatatkan peningkatan sebesar Rp. 270,27 miliar rupiah. Nilai positif ini mencerminkan bahwa Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) Provinsi Kepulauan Riau secara kumulatif masih berdaya saing. Sektor yang menyumbang nilai tertinggi dalam Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) adalah sektor konstruksi sebesar Rp. 3.407,81 miliar rupiah.

Komponen terakhir dari analisis *shift share* adalah Pergeseran Bersih (PB). Pergeseran Bersih (PB) Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dengan menjumlahkan komponen nilai Pertumbuhan Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah. Secara kumulatif, Pergeseran Bersih bergerak turun sebesar -Rp. 871,574 dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Terdapat 6 sektor yang memiliki nilai negatif, diantaranya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; sektor Real Estat; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta sektor Jasa Pendidikan.

**Gambar 2** – Interpretasi Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun



waktu 2020-2024 (dalam persen).

Dalam analisis *Shift Share* (SS) terdapat 4 kriteria penilaian, yakni:

1. Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing Baik (Kuadran I)  
 Sebuah sektor dinilai sebagai sektor dengan pertumbuhan cepat dan berdaya saing baik apabila memiliki nilai Pertumbuhan Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah sama-sama positif [PP (+), PPW (+)]. Dalam analisis *Shift Share* (SS) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 7 sektor yang termasuk kedalam kuadran 1, diantaranya: sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Perusahaan; serta sektor Jasa Lainnya.
2. Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing (Kuadran II)  
 Sebuah sektor dinilai sebagai sektor dengan pertumbuhan cepat dan tidak berdaya saing apabila memiliki nilai Pertumbuhan Proporsional positif dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah negatif [PP (+), PPW (-)]. Dalam analisis *Shift Share* (SS) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 sektor yang termasuk kedalam kuadran 2, diantaranya: sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
3. Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing (Kuadran III)  
 Sebuah sektor dinilai sebagai sektor dengan pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing apabila memiliki nilai Pertumbuhan Proporsional dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah sama-sama negatif [PP (-), PPW (-)]. Dalam analisis *Shift Share* (SS) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 sektor yang termasuk kedalam kuadran 3, diantaranya: sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
4. Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing Baik (Kuadran IV)  
 Sebuah sektor dinilai sebagai sektor dengan pertumbuhan lambat dan berdaya saing baik apabila memiliki nilai Pertumbuhan Proporsional bernilai negatif dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah bernilai positif [PP (-), PPW (+)]. Dalam analisis *Shift Share* (SS) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 7 sektor yang termasuk kedalam kuadran 4, diantaranya: sektor Industri Pengolahan; sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Real Estat; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta sektor Jasa Pendidikan.

Terdapat garis biru yang membelah kuadran menjadi 2 bagian dan membentuk sudut 45°. Bagian atas kuadran menunjukkan sektor yang progresif dari analisis *Shift Share (SS)*, sedangkan bagian bawah kuadran menunjukkan sektor yang lamban dari analisis *Shift Share (SS)*.

## KESIMPULAN

Analisis perhitungan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 4 sektor ekonomi yang berperan sebagai sektor basis (unggulan) yakni: sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan sektor Konstruksi. Tidak heran jika sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor yang menjadi basis di Provinsi Kepulauan Riau karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam yang relatif cukup besar, mulai dari mineral dan energi, hingga sumber daya alam yang bervariasi berupa bahan galian strategis seperti migas, bahan galian vital seperti timah, bauksit, dan pasir besi, serta bahan galian umum seperti granit, pasir, dan juga kuarsa. Namun, data menunjukkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang kedepannya tidak berkemungkinan menjadi sektor basis kembali karena cenderung mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengambil kebijakan proaktif dalam mempertahankan daya saing sektor yang ada sekaligus mengidentifikasi serta mengembangkan potensi sektor basis baru. Tindakan yang pasif justru hanya mempercepat kemunduran kedua sektor tersebut.

Hasil analisis berikutnya menunjukkan bahwa terdapat dua sektor ekonomi yang akan menjadi sektor basis dan prospektif di masa yang akan datang, yakni sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi. Kedua sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat mendorong perekonomian Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang. Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong sinergi dan integrasi keduanya untuk menciptakan dampak berganda (*multiplier effect*) dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan serta mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga harus merancang strategi mitigasi risiko ekonomi dan mempercepat diversifikasi sektor unggulan yang baru. Ketergantungan pada sebuah sektor, terlebih apabila bergantung pada sektor yang trennya menurun dapat mengancam stabilitas ekonomi daerah jika tidak diantisipasi. Sesuai dengan hasil analisis, Provinsi Kepulauan Riau dapat mulai mengembangkan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan berdaya saing baik diantaranya: sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Perusahaan; serta sektor Jasa Lainnya. Pengembangan sektor-sektor potensial ini dapat menggunakan pendekatan terintegrasi yang memanfaatkan keunikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan. Prioritas pengembangan dapat berupa memperkuat infrastruktur dasar seperti Listrik, gas, dan transportasi logistik, mendorong investasi pada pariwisata Bahari berbasis akomodasi dan makan minum, memfasilitasi perdagangan modern baik perdagangan besar maupun eceran, serta mempercepat transformasi digital untuk menciptakan fondasi ekonomi baru yang beragam, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Yogyakarta BPF 1999.
- Asmara, G. D., & Yekti, F. A. (2024). *An Analysis of Leading Sectors in Sleman District*. *Jurnal Simki Economic*, 248-258.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.

- Azwar, & Subekan, A. (2017). *Analisis Persistensi Inflasi di Provinsi Papua Barat. Kajian Ekonomi dan Keuangan 1 (2)*, 109-126.
- BPS Kepulauan Riau. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau menurut Harga Konstan 2020-2024. Kepulauan Riau: BPS Kepulauan Riau*
- BPS. (2021, April 29). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Pengeluaran 2016-2020*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Surakarta: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=FnT+NB1c9zmVRkgDALjjoDIWQ0tLS1Bzc1FwckdULzZpSzF5REF0cVFMZkE5YUN0d3VKUfc2ZmtMaU9oSjVXQ1hkUXN5KzFQRfHhcjEzMm9vRkZrdVRwWmdtYStCbzljZHdXVDBETWk4SE9iNmhQcE9MMjjsUtURS9ESkx1dTNqZnB5cC8yVUhybTdreERMZIBTNINmZTBHSU1FQlplT0>
- BPS. (2024, Oktober). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan : Quarterly Gross Domestic Product of Indonesia 2020 - 2024 Volume 7, 2024*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=ChSFspJh7mYfMf28mdb3WzdtYjZkQXJzSWQwbURUbyWNU5PTjVaVTkzWXlNNkpKbTF0WklSeWowWEJ5Vld5aVltSytRODIkaEpIMVRTWgtKRFB4NEFv eitXQ29XMTFiM0JDTGnuQ01pZ0RKRkU2Y3UvbUU5K3F5RCtIVzIXUZaeTVCR1JQUFA2MWdBY2NvNUwyTGpiRnphbFlaRGZSdX>
- Gatari, A. P., Asmara, G. D., & Khasanah, U. (2024). *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Sektor Unggulan Guna Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Madiun. Journal of Global and Multidisciplinary*, 1741-1484.
- Gravitiani, E. (2006). *Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 35-48.
- Hakim, A. D., Qomariyah, S. N., & Susanti, A. (2020). *Identifikasi Sektor Unggulan dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Jombang dengan Pendekatan LQ, DLQ dan ShiftShare. AGROSAINTIFIKA*, 169-177.
- Halim, A. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Hutapea, A., Koleangan, R. A., & Rorong, I. P. (2020). *ANALISIS SEKTOR BASIS DAN NON BASIS SERTA DAYA SAING EKONOMI DALAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1-11.
- Ikhlasari, A. A., & Salim, A. (2024). *Analisis Sektor Unggulan Provinsi Yogyakarta Menggunakan Teknik Location Quotient (LQ), Shift-share (SS), dan Klassen. Seminar Nasional Lppm Ummat*, 178-191.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tirtayasa Ekonomika*, 17.
- Mulyana, S. M. (2023). *Pembangunan Ekonomi: Teori dan Praktik. Bandung: CV Cendekia Press*.
- Nasution, S. S., & Rujiman. (2023). *Analysis of The Influence of Urbanization, Income Per Capita and Manufacturing Industry on the Economic Growth of North Sumatra. In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) (Vol. 6, No. 1)*, 211-215.
- Sambodo, M. T. (2002). *Analisis Sektor Unggulan Propinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Sofi, I. (2021). *Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2019. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 112-130.

*Sofiyan, R. (2014). Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Pematang. Skripsi.*

*Subandi. (2014). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.*

*Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar. Depok: PT. Rajawali Pers.*

*Tarigan, R. (2005). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.*

*Widodo, T. (2006). Perencanaan pembangunan aplikasi komputer (era ekonomi daerah) . Yogyakarta: STIM YKPN.*